

# PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT MARGINAL: KASUS ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH AHMAD DAHLAN

Husen Hasan Basri

## *Abstract*

*The children of the street have rights for accomplishing their education. By experiences education it is expected that the street's children can obtain the life skill which is functional for their adaptation in the real daily life. This article will study the case of the children of street in Ahmad Dahlan shelter house, Yogyakarta in getting the accomplishment of religious education. How the children of street in shelter house of Ahmad Dahlan obtain the religious education, who and what kind of institute are involving in process of the education, and what form of religious education service which has been given by the institute*

**Keywords:** *children of road, shelter house, religious education*

## I. PENDAHULUAN

*Undang-Undang 1945* Pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak membedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya dalam memperoleh pendidikan. Hal ini relevan dengan rumusan Visi Indonesia ke Depan atau lebih populer disebut *Visi Indonesia 2020*, khususnya terkait dengan sumber daya manusia yang bermutu. Bahkan secara tegas *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)* menjelaskan bahwa: (1) setiap warga negara mempunyai hak

---

Husen Hasan Basri SAg adalah Peneliti  
Puslitbang Pendidikan Agama dan  
Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat  
Departemen Agama RI

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.<sup>1</sup>

Jika konsisten dengan ketetapan perundang-undangan dan visi 2020 tersebut, salah satu jalan yang paling pertama harus dilalui adalah dengan memberikan pendidikan kepada semua warga negara tanpa kecuali. Tetapi, jalan ini penuh dengan tantangan terutama ketika berhadapan dengan perubahan sosial yang terus menerus terjadi. Perubahan sosial, terutama yang disebabkan oleh pembangunan dan modernisasi, tidak selalu bergerak linier dengan rumusan formal yang diidealkan.

Ketimpangan mengiringi proses pembangunan dan modernisasi baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Pada sektor ekonomi, prioritas diarahkan pada pembangunan industri-industri besar padat modal dan industri besar yang mempekerjakan buruh murah. Pada sektor sosial, kelihatan dengan jelas kesenjangan antara kota dan desa. Kota di satu sisi dijadikan tempat pembangunan industri sementara desa sebagai basis sektor pertanian, kurang mendapat perhatian, sehingga sektor pertanian semakin terpuruk dalam kerangka persaingan dan pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>2</sup>

Dampaknya, kota-kota besar menjadi daya tarik bagi sebagian besar masyarakat dengan iming-iming kemudahan memperoleh pekerjaan dan kemewahan. Ini yang kemudian menggiring terjadinya gelombang urbanisasi besar-besaran masyarakat desa guna menggapai gemerlapnya kota itu. Pada waktu yang sama, kondisi ini tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai terutama bagi urban baru yang mayoritas berpendidikan rendah. Maka yang terjadi bukan lahirnya

---

<sup>1</sup> Statemen ini tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 4, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5 Ayat 1 - 3

<sup>2</sup> Dalam kaitan kesenjangan akibat pembangunan, dijelaskan dengan baik oleh Andrinof A Chaniago. 2001. *Gagalnya Pembangunan Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Menurut Andrinof ada tujuh ketimpangan yang diwariskan Orde Baru; ketimpangan penyebaran asset di kalangan swasta, kesenjangan ekonomi antar sektor, kesenjangan antar wilayah, ketimpangan antar sub wilayah, kesenjangan antar golongan sosial ekonomi, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia dan ketimpangan desa-kota.

sebuah masyarakat sejahtera yang bertaburan gemerlap kehidupan kota, tapi justru mencetak orang-orang miskin baru, masyarakat rentan dan masyarakat pinggiran perkotaan. Dan masyarakat inilah yang sering disebut sebagai masyarakat marginal.<sup>3</sup>

Di kota-kota besar, golongan masyarakat yang mengalami proses marginalisasi umumnya kaum pendatang (migran). Mereka ini mengisi ruang-ruang perkotaan dengan berbagai variasi dan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu dari mereka adalah anak jalanan. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan.

Idealnya, masyarakat marginal perkotaan—tidak terkecuali anak jalanan—juga mendapat pemenuhan pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Hal tersebut karena dengan pendidikan diharapkan bisa membekali keterampilan dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan-pilihan, untuk memanfaatkan produk-produk teknologi, untuk bekal berinteraksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok dan antar bangsa. Pada sisi yang berbeda, muncul keyakinan kuat bahwa kemiskinan merupakan rintangan berat bagi seseorang untuk memperoleh hak pendidikannya. Kalaupun mereka “memaksakan” diri untuk masuk dunia pendidikan, tentu harus mengorbankan sebagian peluang kehidupan yang mungkin akan mengganggu normalitas kehidupan sehari-hari.

Masalah anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia—termasuk di kota Yogyakarta—umumnya masih berkisar pada belum terpenuhinya pendidikan mereka. Meski belum tentu berkorelasi positif, kenyataan ini berimplikasi terhadap pendidikan keagamaan di kalangan mereka.

## II. MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji: *pertama*, bagaimana anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan memperoleh pendidikan keagamaan, dan *kedua*, siapa dan lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut, dan *ketiga*, apa bentuk pelayanan pendidikan keagamaan yang telah diberikan oleh lembaga tersebut.

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto. 2005. “Pemberdayaan Masyarakat Marginal di Perkotaan”, dalam Moh. Ali Azis, dkk (Editor). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Surabaya: Pustaka Pesantren, h. 155.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran: *pertama*, profil anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, *kedua*, bentuk-bentuk pendidikan keagamaan yang diberikan pada anak jalanan, *ketiga*, proses pendidikan keagamaan pada anak jalanan menyangkut ketenagaan, materi, fasilitas, biaya, dan *keempat*, hambatan penyelenggaraan dan harapan pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan tentang pendidikan keagamaan pada anak jalanan.

### III. KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Perundangan

Pendidikan keagamaan, termasuk lembaganya, secara eksplisit diakui keberadaannya ketika diundangkannya *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* dan dikeluarkannya *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Pengakuan ini diharapkan bukan sekedar melegitimasi terhadap praktek atau pengelolaan yang ada seperti sekarang ini. Pengakuan ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah harus secara sadar bertanggungjawab atas tumbuh kembangnya pendidikan keagamaan yang semakin kuat, sejalan dengan lembaga pendidikan lainnya, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat lahir dan batin. Pengakuan seperti ini tidak berlebihan mengingat pendidikan keagamaan telah mewarnai sejarah pendidikan di negeri ini. Pendidikan keagamaan secara kelembagaan telah setia melayani masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Mengapa demikian karena pendidikan keagamaan pada hakekatnya adalah pendidikan yang dilahirkan oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat, sehingga keberadaannya memiliki akar dan pijakan yang kuat di tengah-tengah lapisan masyarakat.

Persoalan muncul ketika pendidikan keagamaan dikaitkan dengan perubahan sosial dimana pendidikan harus mampu memenuhi dan menyiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depannya dalam kehidupan riil di masyarakat. Ada kontradiksi di sini. Di satu sisi pendidikan keagamaan bergerak pada ranah penajaman spiritual, di sisi lain tuntutan masyarakat, terutama dunia kerja, menghendaki keterampilan khusus untuk bisa memasukinya. Persoalan lain yang dihadapi terkait dengan kontekstualisasi pendidikan keagamaan. Siapa peserta didik yang dihadapi, seyogianya pendidikan keagamaan mentransfer dirinya untuk menyesuaikan dengannya. Misalnya, bila peserta didik anak-

anak nelayan sebaiknya berbeda nuansanya dengan ketika peserta didiknya anak-anak artis. Dalam konteks seperti ini, pendidikan keagamaan tidak saja menuntut ketersediaan tenaga yang mumpuni (jumlah dan kualitas) tetapi juga referensi-referensi pendukung perlu disediakan. Secara kelembagaan juga ada persoalan, misalnya bagaimana peserta didik lembaga pendidikan keagamaan bisa berpindah pilihan atau melanjutkan ke satuan pendidikan umum sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya.

### **B. Hakekat Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Ada dua istilah yang selalu berdampingan dan terkadang melahirkan pengertian yang rancu diantara keduanya yaitu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dua istilah ini perlu dibedakan sehingga nantinya bisa menentukan pilihan sesuai dengan tujuan (penelitian) yang dicapai. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan<sup>4</sup> Dengan demikian pendidikan agama diharapkan mampu membangun watak dan kultur bangsa yang religius, tidak semata dalam aspek ritus dan peribadatan tetapi justru refleksi spirit keagamaan dalam seluruh perbuatan professional dan social masyarakat Indonesia. Adapun pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.<sup>5</sup>

Merujuk pada pengertian di atas, ada perbedaan mendasar antara pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama diberikan sebagai upaya membina ketakwaan peserta didik dan mampu merefleksikan sikap dan tindak ketakwaannya itu dalam seluruh perbuatan profesi dan sosialnya. Sementara pendidikan keagamaan adalah jalur dan jenis pendidikan yang lebih memperbesar penawaran pelajaran agama, dengan tujuan membina calon ahli-ahli ilmu agama (Islam),

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab I Pasal 1 Ayat 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Bab I Pasal 1 Ayat 2

yang tidak saja membentuk kepribadian religius pada dirinya, tetapi juga dapat memberikan pembinaan keagamaan pada orang lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan (pasal 13 ayat (1)). Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (pasal 14 ayat (1) dan (2)). Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis (pasal 21 ayat (1)).

Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang memberikan peserta didik kandungan nilai, ajaran, dan doktrin agama. Definisi ini tidak sepenuhnya mengacu pada peraturan-peraturan sebagaimana yang telah disebutkan.

### **C. Anak Jalanan Sebagai Salah Satu Kelompok Masyarakat Marginal**

Tonggak kajian masyarakat marginal bisa ditemukan pada tulisan Antonio Gramsci dengan menggunakan istilah *subaltern*. Kajian Gramsci tentang *subaltern* ini digunakan untuk menjelaskan masyarakat *inferior*, yaitu masyarakat yang tidak masuk dalam kategori subyek *hegemoni*. Kelompok *subaltern* merupakan kelompok kelas petani, buruh, dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan *hegemonik*. Masyarakat Subaltern sebenarnya digunakan Gramsci untuk menggugat penulisan sejarah yang tidak adil. Sejarah *subaltern* sama kompleksnya dengan sejarah kelas dominan, tetapi tidak diakui sebagai sejarah yang resmi. Hal ini terjadi karena kelas-kelas *subaltern* tidak mempunyai cukup akses kepada sejarah, kepada representasi mereka sendiri, kepada institusi-institusi sosial dan kultural.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Gramsci, Paulo Freire<sup>7</sup> lebih tertarik menggunakan istilah kaum tertindas. Kaum tertindas ini bermacam-macam, tertindas rezim otoriter, tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil dan deskriminatif maupun tertindas karena warna kulit, jender, ras dan sebagainya. Menurut Freire, ada dua ciri masyarakat tertindas, *pertama*, mereka mengalami *alienasi* baik dari dirinya maupun lingkungannya. Mereka

---

<sup>6</sup> Antariksa, Intelektual, Gagasan Subaltern, dan Perubahan Sosial, <http://kunci.or.id/esai/misc/antariksa-subaltern.htm>

tidak bisa menjadi subyek otonom, melainkan hanya mampu mengimitasi orang lain. *Kedua*, mereka mengalami *self-depreciation*, merasa bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Padahal saat mereka tercipta sebagai manusia, sudah berinteraksi dengan dunia dan manusia lain, sebenarnya mereka tidak lagi menjadi bejana kosong, tetapi telah menjadi makhluk yang mengetahui. Penegasan inilah yang sangat penting akan pemihakan Freire terhadap kaum marginal. Berdasarkan filosofi tersebut, maka Freire menegaskan bahwa tugas pendidikan adalah mengantar peserta didik menjadi subyek. Caranya dengan membangkitkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus berupaya mentransformasikan struktur sosial yang menyebabkan penindasan terus berlangsung.

Merujuk dua pemikir di atas, ada dua kata kunci (*inferior* dan tertindas) yang bisa menuntun untuk menemukan siapa sebenarnya masyarakat marginal itu. Referensi-referensi lain menyamakan marginal dengan kemiskinan. Tetapi jika merujuk pada asal katanya, marginal berarti tepi atau pinggir. Masyarakat marginal berarti masyarakat yang berada di pinggiran. Akan tetapi lebih dari sekedar pinggiran, esensi dari masyarakat marginal adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau kelompok untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. Masyarakat marginal berkaitan dengan kemampuan memperoleh akses. Maka sebenarnya masyarakat marginal bukan hanya terkait dengan ekonomi, melainkan juga politik, dan budaya. Marginalisasi politik terjadi pada masa Orde Baru dimana terjadi suatu proses yang menimpa kelompok tertentu untuk tidak berdaya secara politik. Kebijakan *floating mass* misalnya merupakan marginalisasi politik yang dilakukan Negara terhadap rakyatnya. Kelompok tertentu yang terkena kebijakan *floating mass* tersebut menjadi begitu lemah dalam akses politik walaupun mereka tahu memiliki hak yang sama dengan kelompok lain. Di bidang ekonomi, proses marginalisasi bisa ditemukan pada kebijakan-kebijakan negara yang tidak memihak kepada rakyat miskin. Suatu kelompok yang mengalami marginalisasi ekonomi umumnya tidak banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan sulit untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/030505/opini/275458.htm>

<sup>8</sup> Lihat, Bagong Suyatna. *Op cit.*, hh.141-158

Y. Argo Twikromo mengaitkan salah satu kelompok marginal dalam konteks perkotaan dengan istilah gelandangan. Menurutnya, kaum gelandangan mempunyai kedudukan yang khas apabila dilihat dari sudut konstruksi budaya masyarakat kota yang 'resmi'. Di satu sisi mereka sudah terlepas dari budaya asal mereka (pada umumnya pertanian), namun di sisi lain merekapun belum dapat diterima sebagai bagian dari struktur budaya yang ada di lingkungan perkotaan. Keadaan tersebut telah menempatkan gelandangan sebagai salah satu kelompok yang berada dalam posisi yang tidak diuntungkan karena dianggap tidak bisa menemukan rantai penghubung dengan struktur budaya yang ada dan bahkan dianggap dapat mengancam atau mengacaukan keberadaan konstruksi budaya kota tersebut. Dan pada akhirnya kelompok tersebut akan diasingkan atau dipinggirkan di tengah gencarnya penumpukan citra tentang struktur budaya kota yang dianggap 'resmi'.<sup>9</sup>

Di kota-kota besar, golongan masyarakat yang mengalami proses marginalisasi umumnya kaum pendatang (migran). Mereka ini mengisi ruang-ruang perkotaan dengan berbagai variasi dan kemampuan yang dimilikinya. Orang jalanan (dalam kategori ini masuk anak jalanan, orang dewasa jalanan, pemulung jalanan), penghuni pemukiman kumuh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, tukang becak, kuli panggul dan seterusnya, yang pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan.

Fenomena anak yang bekerja atau hidup di jalanan mulai ditemukan di kota Yogyakarta dan Jakarta pada akhir dekade 1970-an hingga awal dekade 1980-an. Pada masa itu istilah anak jalanan belum dikenal. Istilah yang dipakai berasal dari anak-anak di kota itu sendiri. Di kota Yogyakarta anak-anak yang menggelandang di sekitar Malioboro dan stasiun Tugu menyebut dirinya dengan istilah *Tikyan*, sedang di Jakarta kelompok semacam ini menyebut diri sebagai *gembel*. Pada tahun 1995, di Yogyakarta muncul gelandangan anak yang berjenis kelamin perempuan. Mereka disebut dengan istilah *rendan* yang merupakan akronim dari kere-dandan. Di kota Yogyakarta, istilah *tikyan* dan *rendan* dipakai untuk membedakan kelompok mereka dengan kelompok anak kampung yang juga mencari makan di jalanan. Berbeda dengan *tikyan*, anak kampung tidak menjadikan jalanan sebagai tempat hidup,

---

<sup>9</sup> Y. Argo Twikoro. 1999. *Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatahan Sosial-Budaya "Resmi."* Yogyakarta: Universitas Atmajaya, h. 3.



melainkan tempat bekerja atau mencari uang. Pembeda lainnya adalah anak kampung masih pulang.<sup>10</sup>

Pada awal 1990-an, gelandangan anak mulai menjadi isu yang mengemuka. Pada era itu juga Chilhope dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) melakukan penelitian tentang kelompok gelandangan anak. Penelitian ini mulai menggunakan istilah anak jalanan untuk menyebut kelompok gelandangan anak. Penelitian ini membedakan dua kelompok anak jalanan, yaitu anak hidup di jalan (*children of the street*) dan anak kerja di jalan (*children on the street*). Namun demikian, pihak pemerintah saat itu belum menggunakan istilah anak jalanan, apalagi istilah *tikyan* dan gembel. Bahkan Pemerintah tidak mengakui keberadaan anak jalanan di Indonesia. Pemerintah masih memasukkan anak jalanan sebagai bagian dari anak terlantar, anak penyandang masalah sosial atau dikategorikan sebagai gepeng. Barulah sekitar 1997, seiring terjadinya krisis ekonomi dan masuknya dana penanggulangan anak jalanan dari luar negeri (UNDP dan ADB) istilah anak jalanan mulai digunakan pemerintah dalam percakapan formal, dan pemerintah mengakui keberadaan anak jalanan.<sup>11</sup>

Kategori anak hidup di jalan dan anak kerja di jalan didasarkan pada hubungan antara anak dan orang tuanya. Selain kategori tersebut, ada kategori lain yang didasarkan atas interaksi anak di ruang publik perkotaan, sebagai tempat hidup atau sekedar untuk bekerja. Interaksi anak di ruang publik perkotaan ada yang dilakukan sendiri ada yang bersama keluarga. Anak yang memperlakukan ruang publik sebagai tempat hidup melahirkan kategori (1) anak dalam keluarga gelandangan dan (2) anak yang hidup sendiri di jalan. Sementara, mereka yang menganggap jalanan hanya sekedar tempat mencari uang melahirkan kategori (3) anak jalanan pulang berkala, dan (4) anak pulang setiap hari atau anak kerja di jalan. Sekitar tahun 2000-an, muncul kategori anak rentan jalanan. Istilah ini dipakai untuk menyebut (a) anak yang sama sekali belum turun ke jalan tetapi berpotensi besar untuk turun ke jalan, (b) anak yang sama sesekali bekerja di jalan, biasanya hanya saat libur dan sekedar untuk mencari uang jajan. Jika dikaitkan dengan kelompok anak jalanan yang telah disebutkan, maka anak jalanan dari

<sup>10</sup> Aan, dkk. 2000. *Anak Jalanan di Indonesia: Deskripsi Persoalan dan Penanganan*, Yogyakarta: YLPS Humana, h.9

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 10

temuan penelitian adalah anak kerja di jalan (*children on the street*). Artinya, anak-anak itu setelah bekerja mereka kembali ke tempat tinggal mereka di rumah singgah atau sanggar seperti komunitas anak jalanan yang ada rumah singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta.

#### IV. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kota Yogyakarta pada Oktober 2007 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, peneliti sangat berperan dalam proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai langkah awal penelitian, peneliti langsung melihat tempat mangkal para anak jalanan di sekitar Yogyakarta seperti persimpangan-persimpangan jalan yang dilengkapi *traffic light*, stasiun kereta api, terminal bus, sekitar Malioboro, dan sepanjang trotoar yang ramai dengan aktivitas perdagangan untuk sekedar mengetahui seperti apa profil singkat mereka. Selanjutnya, bertemu dengan pihak yang berwenang, yaitu Dinas Sosial kota Yogyakarta untuk mengetahui jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya terdapat data jumlah anak jalanan. Walaupun data yang diberikan pihak Dinas Sosial Tahun 2004, peneliti mendapatkan jumlah anak jalanan di kota Yogyakarta sebanyak 199 orang.

Setelah mengetahui jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kantor Kandepag Kota Yogyakarta terkait dengan pelayanan pendidikan keagamaan kepada anak jalanan. Kasi Urais menyarankan untuk mengambil objek penelitian anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Dengan mengambil objek penelitian anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan berarti peneliti menentukan pilihan pada anak yang kerja di jalan (*children on the street*) bukan anak yang hidup di jalan (*children of the street*).

Dalam pengumpulan data, peneliti mewawancari anak jalanan dan pengurus Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Wawancara dilakukan dengan dua cara; formal dan informal. Wawancara formal yang dimaksud adalah peneliti melakukan wawancara dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada informan bahwa akan dilakukan wawancara. Sedangkan wawancara informal akan dilakukan kapan saja ketika peneliti menemukan informan dan bisa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada informan. Jumlah informan tidak ditetapkan sebelumnya secara pasti tetapi ditentukan saat proses penelitian berlangsung berdasarkan tingkat kecukupan perolehan data yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan konsep, teori pendukung dan referensi yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian, dilakukan studi kepustakaan. Di samping melalui metode pengamatan terhadap para anak jalanan Rumah Singgah Ahmad Dahlan baik saat berada di rumah singgah maupun di tempat mangkal mereka.

Analisis data dilakukan dengan cara mendalami dan menginterpretasikan fenomena yang bisa dicatat yang bersumber dari tindakan dan perkataan obyek penelitian. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengorganisasi data dari hasil catatan lapangan baik yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen.

## V. HASIL PENELITIAN

### A. Profil Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Anak jalanan dari temuan penelitian adalah anak kerja di jalan (*children on the street*). Artinya, anak-anak itu setelah bekerja mereka kembali ke tempat tinggal mereka di rumah singgah atau sanggar dalam hal ini Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Jumlah anak jalanan yang tinggal di rumah singgah Ahmad Dahlan pada tahun 2007 sebanyak 24 anak. Usia mereka antara 9 sampai 17 tahun. Mereka ada yang masih berasal dari daerah-daerah di Propinsi Yogyakarta seperti Didit Nuar (Bantul), Hamzah Samsudin (Gunung Kidul), Bimo Aprianto (Celeban), Slamet Solopok, (Bantul), Slamet Sutrisno (Kulonprogo), Marwoto (Bantul). Bahkan dari mereka berasal dari kecamatan-kecamatan di Kotamadya Yogyakarta seperti Nurdianto dan Nunuk (Umbulharjo) dan Widyawati (Gedongtengen). Mereka juga ada yang berasal dari luar Yogyakarta. Mereka itu adalah Edi Suropto (Purworejo), Kamaludin (Semarang), Kurniawan (Semarang), Arif Sucahyo (Magelang), Deni Abdullah (Bandung), Bayu Putra Ragil (Banyuwangi), Gusti Jova Rahul (Solo), Agung Wibowo dan Somad (Pacitan), Singgih Prayuda (Klaten), Anik (Sidoarjo), Dewi Sayekti (Magelang), Prasetyo (Surabaya), dan Dombloh (Cilacap). Satu-satu anak yang berasal dari luar Jawa adalah Agus Setyawan Sitepu (Medan). Dari jumlah tersebut, hanya 4 anak yang berjenis kelamin perempuan.

Dari 24 anak jalanan di rumah singgah Ahmad Dahlan, ekonomi orang tua menjadi salah satu faktor utama mereka turun ke jalan (kasus Kamaludin, Kurniawan, Slamet Sutrisno, Anik dan Gombroh). Faktor ini membuat orang tua untuk mengharuskan anak membantu

orang tua (kasus Didit Nuari). Kalau si anak tidak mau, mereka di suruh (Agus, Bimo, Gusti Jova) atau dipaksa (Arif, Deni, Slamet Solopok Singgah Prayuda) oleh orang tuanya. Alasan lain kenapa mereka turun ke jalan adalah punya ibu tiri (Edi, Dewi, Nunuk), diajak teman (Hamzah, Bayu, Somad, Nurdianto), ikut pacar (Widyawati), dendam sama bapak (Prasetyo). Ada juga dari mereka turun ke jalan karena mencari kebebasan (Agung dan Marwoto).

Faktor-faktor menjadi anak jalanan sebagaimana telah disebutkan tidak berbeda dengan hasil temuan lainnya. Aan T. Subhansyah dkk, misalnya, menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan ekonomi keluarga sering disebut sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan. Tetapi menurutnya ada faktor lain yang saling merajut, seperti kekerasan dalam keluarga, perpecahan dalam keluarga, atau pengaruh lingkungan. Hubungan kemiskinan dengan faktor-faktor lain yang membuat anak-anak beresiko turun ke jalan dapat dijelaskan sebagai berikut: tekanan ekonomi akibat kemiskinan membuat orang tua mengharuskan anak-anak mereka turut menanggung beban keluarga. Atau, anak-anak yang menyadari kondisi keluarganya miskin, kemudian ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja, baik di jalanan atau di tempat lainnya. Ada pula anak-anak dari keluarga miskin tersebut yang turun ke jalan setelah mendapat kekerasan dari orang tua atau karena masalah lain seperti perceraian orang tua. Selain itu, faktor lingkungan social seperti diajak teman atau ikut dengan teman menjadi pendorong munculnya fenomena anak jalanan.<sup>12</sup>

Bagaimana mereka yang sebelumnya berada di jalan kemudian tinggal di rumah singgah Ahmad Dahlan. Ada dua cara perekrutan mereka ke rumah singgah Ahmad Dahlan, yaitu: diajak pekerja sosial Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan diajak oleh anak binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Putra (16 tahun) demikian dipanggil. Nama aslinya Bayu Putra Ragil. Ia lahir di Banyuwangi dan telah meninggalkan keluarganya untuk turun ke jalanan sejak masih berumur 10 tahun karena kekecewaannya terhadap orang tua yang bercerai sehingga merasa dirinya tidak diperhatikan lagi oleh keluarganya. Kemudian ia banyak tinggal dengan neneknya yang berada di Yogyakarta. Pada dasarnya keluarga Putra termasuk keluarga yang cukup mampu. Namun karena

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 14

ketidaknyamanan yang tidak pernah didapatkannya di keluarga, ia memilih untuk pergi dan bergabung dengan para pengamen jalanan. Selama pengembaraannya, ia termasuk pengamen lintas pulau karena pernah mengamen sampai ke Bali, Sumatra bahkan Kalimantan. Selama itu pula, banyak pengalaman di jalan yang ia dapatkan, mulai kekerasan oleh preman hingga penyimpangan seksual sesama teman sejalan. Salah satu kebiasaan Putra yang sampai saat ini masih sulit dihilangkan adalah mengambil barang orang lain, apapun itu bentuknya, dari mulai aksesoris, sepatu, buku, helm bahkan gelas dan piring.

### **B. Pekerjaan, Penghasilan dan Distribusi Pengeluaran.**

Berbagai jenis pekerjaan dilakukan dalam rangka bertahan hidup. Menurut pengakuan anak yang terungkap dalam diskusi kelompok, pilihan pekerjaan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni pekerjaan itu secara teknis mudah dilakukan, mudah menghasilkan uang, dan fleksibel dalam waktu dan tempat. Pekerjaan mereka umumnya pengamen, penjual asongan, pemulung, pengemis, pedagang rokok keliling, kuli panggul, dan tukang sol sepatu. Jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan anak jalanan adalah mengamen. Jenis pekerjaan ini dianggap oleh para anak jalanan dianggap tidak membutuhkan banyak tenaga, modal dan peralatan, dan tidak membutuhkan bekal keterampilan tertentu. Pekerjaan ini dianggap lebih mudah mendapatkan uang. Dan aktivitas ini bisa dilakukan kapan saja. Jenis pekerjaan yang dirasa sulit bagi anak jalanan adalah berjualan (asongan atau kaki lima). Jenis pekerjaan ini memerlukan modal, keterampilan, dan peralatan tertentu, serta tidak bisa dilakkan sembarang waktu dan tempat.

Penghasilan mereka sebenarnya bisa dikategorikan tidak tetap. Tetapi, umumnya penghasilan mereka rata-rata 10.000 sampai 25.000. Penghasilan yang didapatkan oleh anak jalannya dipergunakan umumnya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Kalau memang penghasilan mereka kebetulan lebih, maka biasanya mereka dapat makan enak atau digunakan untuk kebutuhan lain pada hari yang sama seperti bermain *play station*. Adanya kecenderungan untuk menghabiskan hasil jerih payah mereka berkaitan dengan konteks kehidupan jalanan yang kurang memungkinkan untuk dapat menyimpan uang atau barang secara berlebihan.

### C. Pola Kepemimpinan

Anak jalanan di rumah singgah Ahmad Dahlan yang termasuk *children on the street* (anak yang bekerja di jalan) relatif memiliki aturan yang dibuat oleh rumah singgah yang bersangkutan. Mereka diikat oleh peraturan yang dibuat para pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Menurut Argo Twikoro yang meneliti gelandangan Yogyakarta, tipe anak jalanan ini berbeda dengan anak jalanan yang hidup di jalan (*children of the street*). Tipe anak jalanan yang hidup di jalan bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Mereka tidak memiliki struktur organisasi yang menggerakkan, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja mereka. Mereka bebas bekerja tanpa memiliki ikatan dengan orang lain, dan menurut mereka ini lebih baik dari pada diatur-atur. Komunikasi yang dibangun sebatas obrolan tentang kelancaran dan hasil kerja, tidak ada saran atau jalan keluar mengatasi persoalan, misalnya ketika tidak memperoleh pendapatan.<sup>13</sup>

Rumah singgah Ahmad Dahlan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Penyantun, Dewan Pengarah, pimpinan, sekretaris, bendahara, dan koordinator masing-masing divisi. Pimpinan lembaga salah satunya bertugas mengkoordinasi semua kegiatan, manajemen maupun program kegiatan. Ia didampingi oleh seorang sekretaris. Bendahara bertugas membidangi keuangan umum organisasi dan menyusun anggaran pendapatan belanja organisasi. Divisi-divisi yang dipimpin oleh koordinator masing-masing adalah perpustakaan, fundraising, pendidikan, pemberdayaan, keagamaan, dan lapangan. Artinya, secara struktur mereka dipimpin oleh pengurus rumah singgah Ahmad Dahlan.

### D. Potret Pendidikan Keagamaan

Salah satu resiko menjadi anak jalanan adalah kehilangan kesempatan pendidikan. Pekerjaan dan kehidupan mereka di jalanan akan menimbulkan resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan kesempatan mendapatkan pendidikan. Bahwa belajar apapun, terutama yang bersifat formal, pastilah membutuhkan waktu, ruang dan sumberdaya tertentu. Hidup atau kerja di jalan akan menyita banyak waktu si anak, sehingga mereka akan kesulitan mengalokasikan waktunya untuk kegiatan belajar.

Memang banyak anak kerja di jalan yang masih sempat bersekolah, akan tetapi banyak pula diantara mereka yang mengaku tidak memiliki

---

<sup>13</sup>Y. Argo Twikoro. *Op. Cit.*, h. 3.

waktu untuk mengulang kembali pelajaran yang telah didapat di sekolah atau sekedar mengerjakan PR di rumah. Biasanya sepulang dari sekolah, si anak langsung turun ke jalan, setelah itu mereka akan merasa capek dan perlu waktu istirahat agar esok harinya bisa berangkat ke sekolah. Dengan situasi tersebut, aktivitas dan prestasi sekolah anak kerja di jalanan beresiko menjadi tidak maksimal.

Berikut ini dijelaskan Rumah Singgah Ahmad Dahlan sebagai lembaga yang memberikan pendidikan keagamaan, bentuk-bentuk pendidikan keagamaan yang diberikan pada anak jalanan sebagai binaannya, jenis pendidikan keagamaan, hambatan dan harapan penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada anak jalanan.

### 1. Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Rumah singgah Ahmad dahlan terletak di RW 8 dukuh Sidobali kelurahan Muja Muju kecamatan Umbul Harjo kota Yogyakarta. Untuk menjangkau rumah singgah Ahmad Dahlan relatif mudah karena transportasi. Sehingga untuk mencapai ke rumah singgah Ahmad Dahlan melalui Jl Timoho cukup dengan bus kota tanpa harus memilih jalur karena semua jalur bus akan melewati gang jalan Balirejo.

Rumah singgah Ahmad Dahlan adalah sebuah lembaga yang konsen terhadap anak jalanan. Lembaga ini didirikan tanggal 14 Maret 2000. Pendiriannya digagas beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga—sekarang UIN Yogyakarta—untuk membentuk sebuah yayasan yang khusus untuk mengurus anak jalanan. Sebagai langkah awal, sekelompok mahasiswa tersebut mengadakan audiensi kepada rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan pada akhirnya didapatkan bantuan dana dan restu untuk mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Ahmad Dahlan (*Ahmad Dahlan Foundation*). Yayasan ini di penghujung tahun yang kedua dipercaya oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk mengelola satu rumah singgah.

Rumah singgah ini berkeinginan membangun rumusan pendampingan alternatif, yaitu dengan kerangka pendampingan yang berbasis mental spiritual, bakat, minat dan kemauan, psikologis. Karena itu rumah singh ini memiliki visi membentuk insan (anak) mandiri yang berakhlak mulia. Salah satu misinya adalah mendirikan sentra-sentra pendidikan untuk anak jalanan. Salah satu divisi rumah singgah terdapat divisi keagamaan yang bertugas: pendampingan belajar membaca al-Quran,

pelatihan praktek shalat, wudhu, tayamum dan yang berhubungan dengan agama Islam, menyediakan sarana pembelajaran al-Quran, dan melakukan kontrol terhadap pengamalan shalat.

Walaupun anak-anak memiliki kegiatan yang berbeda-beda, pengurus rumah singgah Ahmad Dahlan menetapkan pedoman kegiatan yang dilaksanakan oleh semua anak binaan baik yang bekerja, sekolah, atau yang hanya di rumah singgah saja. Kegiatan sehari-hari dimulai sejak bangun tidur jam 04.30 sampai tidur kembali jam 21.30. Jam 07.00-13.00 diisi dengan kegiatan di luar. Selain jam itu, anak jalanan mendapat kegiatan rutin seperti menjalankan shalat lima waktu, disamping mendapat pengajaran agama seperti mengaji al-Quran.

Peraturan dan tata tertib diberlakukan di rumah singgah Ahmad Dahlan. Di samping peraturan yang mengarah kepada pembinaan akhlak, salah satu peraturan yang membedakan dengan anak jalanan yang hidup di jalan (*children of the street*) adalah bentuk-bentuk pelarangan, yaitu tidak boleh ke luar malam lebih dari jam 21.00, tidak boleh tidur (menginap) di rumah teman, emperan toko, stasiun, terminal, dan lain sebagainya, dilarang menempel gambar-gambar/corat coret tembok, dilarang menjual, mengambil, dan merusak alat dan barang-barang milik rumah singgah, tidak diperbolehkan berantem dan berkelahi sesama penghuni rumah singgah, tidak boleh membawa senjata tajam di rumah, tidak boleh meminta makanan, minuman dan sebagainya di luar rumah singgah, dilarang menato, menyemir rambut dan mencoret-coret baju di rumah singgah, tidak boleh melawan dan berabi kepada Pembina rumah singgah, dan tidak boleh dobel pelayanan di rumah singgah lain.

Bila peraturan itu dilanggar, maka anak diberi sanksi berdasarkan tahapan berikut: kartu kuning I akan diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan yang pertama kali seperti mencuri baju teman, berkelahi dengan sesama penghuni rumah singgah. Kartu kuning II akan diberikan apabila anak mengulang melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya, seperti setelah seminggu lalu melakukan mencuri baju temannya dan telah diberikan kartu kuning yang I kemudian minggu ini melakukan kesalahan lagi bertengkar dengan teman maka akan dikenakan kartu kuning yang ke II. Kartu kuning yang ke III akan diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan ketiga kalinya secara berturut-turut. Untuk selanjutnya akan diambil tindakan yang preventif



yaitu melalui rapat antara pengurus dan Pembina untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

## 2. Bentuk dan Jenis Pendidikan Keagamaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 pasal 14 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Selanjutnya dalam pasal 21 disebutkan juga bahwa pendidikan diniyah non-formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis taklim, pendidikan al-Quran, diniyah takmilyah, atau bentuk lain yang sejenis.

Jika peraturan tersebut dipakai untuk memotret bentuk-bentuk pendidikan keagamaan yang didapatkan oleh anak-anak jalanan di rumah singgah Ahmad Dahlan tentu saja belum bisa dimasukkan pada bentuk pendidikan keagamaan, karena secara jelas dalam peraturan itu disebutkan kata 'peranan' dan 'menjadi ahli ilmu agama' (pasal 1 ayat (2)) yang berarti memiliki kaitan dengan profesi. Namun jika pendidikan keagamaan diartikan sebagai pendidikan yang mengandung nilai, ajaran, dan doktrin agama. Maka dari temuan penelitian dapat disebutkan bahwa anak jalanan telah mendapatkan pendidikan keagamaan dari lembaga rumah singgah Ahmad Dahlan dalam bentuk program pendidikan keagamaan.

Jenis pendidikan keagamaan dari program tersebut berkisar pada: pendampingan belajar membaca al-quran, praktek shalat, wudhu, tayamum dan yang berhubungan dengan agama Islam, menyediakan sarana pembelajaran al-quran, pembinaan akhlak dan melakukan kontrol terhadap pengamalan shalat.

Dalam proses pembelajaran di rumah singgah Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut: *pertama*, dari segi ketenagaan yang paling berperan dalam pendidikan keagamaan ada pada peran bersama. Namun begitu guru-guru yang mengajar ditetapkan oleh pihak pengurus rumah singgah. Mereka sebagian besar dari mahasiswa dan sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Kedua*, materi agama yang diberikan tidak seperti layaknya di lembaga formal, tetapi lebih diarahkan pada penanaman dan penambahan serta praktek akhlak dan ajaran agama. *Ketiga*, fasilitas masih terbatas, walaupun demikian lembaga memiliki perpustakaan yang meliputi bahan bacaan seperti buku buku-cerita/kisah para nabi, sahabat,

kitab Suci Al-qur'an dan terjemahnya, audio visual televisi yang dimanfaatkan untuk memutar film tentang kisah para nabi dan sahabatnya.

*Keempat*, biaya mereka gratis bahkan anak-anak yang masih sekolah mendapatkan bantuan biaya buku, pakaian dan lainnya. Banyak donator yang datang peduli terhadap kegiatan. Ada beberapa sumber pembiayaan kegiatan rumah singgah Ahmad Dahlan selurunya, dan kegiatan pendidikan secara khusus, berasal dari rumah usaha, penyebaran proposal ke berbagai instansi, bantuan dari lembaga-lembaga, dan bantuan dari para donator tetap.

*Kelima*, sarana dan prasarana. Sebagai sebuah yayasan yang terorganisir, rumah singgah Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar aktifitas yayasan dalam melayani dan memberdayakan anak-anak binaan. Sarana dan prasarana pendidikan rumah singgah Ahmad Dahlan adalah: 1) fasilitas dalam rumah singgah, yang terdiri dari: ruang shalat, asrama, ruang kelas tempat proses belajar mengajar, perpustakaan, rumah tinggal, kamar pembina, kantor tata usaha, dapur, dan meja lantai (untuk belajar). 2) fasilitas pendidikan, yang terdiri dari buku bacaan, komputer, *whiteboard*, alat peraga, buku silabus, tipe recorder, sound system, CD Islami, kaset Islami, al-Quran, Iqra, dan rak tempat buku. Rumah singgah ini juga menyediakan sarana fasilitas komunikasi dan transportasi, yaitu: telepon, televis, sepeda, dan sepeda motor.

### 3. Hambatan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.

Walaupun sudah menjadi anak binaan di rumah singgah Ahmad Dahlan, mereka belum menerapkan apa yang dipelajarinya. Mereka susah menerima agama dan perlu dirubah mentalnya. Dalam pemberian materi pelajaran kepada mereka harus tahap demi tahap dan mengikuti alur mereka bukan pengajar yang harus diikuti. Mereka beranggapan bahwa program yang sedang dijalankan oleh rumah singgah Ahmad Dahlan sama seperti yang dilakukan LSM-LSM lainnya. Mereka menganggap LSM juga pemerintah yang menghabiskan uang Negara.

Hambatan lain menyangkut penyelenggaraan pendidikan keagamaan di rumah singgah Ahmad Dahlan adalah: 1) kurang adanya koordinasi antara pemerintah dengan lembaga binaan, yang seringkali anak binaan terkena operasi trantib. Padahal mereka masih dalam proses pembinaan dalam sanggar, 2) sering dicurigai oleh anak jalanan senior, karena memang dulunya sebagai anak buahnya mereka harus setor

kepada senior, sekarang tidak lagi menyetor, 3) kegiatan mereka sering dianggap mengganggu masyarakat, karena letak dekat dengan terminal sering mendapatkan teguran dari dinas lalu lintas, 4) masih minimnya tenaga pengajar terutama pendidik agama yang peduli terhadap pembinaan anak jalanan, dan 5) minimnya perhatian pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama sebagai pelayan pendidikan keagamaan) dan lembaga-lembaga ormas Islam dalam memberikan pembinaan anak jalanan

#### 4. Harapan terhadap Pendidikan Keagamaan

Para pengurus Rumah Singgah Ahmad Dahlan mengharapkan adanya kepedulian dari pemerintah (departemen agama) dan ormas-ormas Islam untuk membantu program-program pendidikan keagamaan baik yang berupa dukungan moral maupun material. Perbedaan budaya antara masyarakat marginal sebagai budaya tidak dominan dan masyarakat umum (budaya dominan) perlu sedikit didekatkan oleh tokoh agama atau ustadz yang memperhatikan kondisi mereka dengan jalan mengunjungi serutin mungkin rumah singgah Ahmad Dahlan tidak hanya pada acara-acara tertentu saja melainkan para tokoh agama tersebut menyapa dan berdialog dengan mereka serta mau memberikan pendidikan keagamaan bagi mereka.

Perlu dipikirkan kedepan adanya model pelayanan pendidikan bagi anak jalanan baik yang hidup selamanya di jalan atau yang hanya bekerja di jalan. Dengan kata lain ada pengajian khusus untuk mereka yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal mereka.

### VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Proses menjadi anak jalanan yang tinggal di rumah singgah Ahmad Dahlan terjadi dipengaruhi oleh faktor ekonomi (kemiskinan orang tua) dan kehendak sendiri. Sedangkan proses menjadi anak binaan di rumah singgah karena direkrut oleh pekerja social Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan diajak oleh anak yang terlebih dahulu menghuni rumah singgah tersebut.

Karena anak-anak jalanan itu tinggal di rumah singgah maka mereka secara otomatis mendapatkan pendidikan keagamaan dari lembaga tersebut. Tidak ada bentuk pendidikan keagamaan Islam secara khusus (pendidikan diniyah dan pesantren) yang diberikan kepada anak jalanan di rumah singgah Ahmad Dahlan. Namun, jenis pendidikan

keagamaan yang diberikan oleh rumah singgah Ahmad Dahlan adalah pengajian al-quran, pembinaan akhlak, pendampingan belajar membaca al-quran, praktek shalat, wudhu, tayamum dan yang berhubungan dengan agama Islam.

Meskipun demikian, dapat direkomendasikan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk menugaskan para penyuluh, para dai atau relawan untuk memberikan pelayanan pendidikan keagamaan kepada anak jalanan di rumah singgah Ahmad Dahlan. Karena anak jalanan dalam penelitian ini berkategori *children on the street* (anak yang bekerja di jalan) yang masih bisa dijangkau maka bagi para penyuluh agama untuk merambah ke tipe anak yang hidup benar-benar di jalan (*children of the street*) karena anak-anak kategori ini diduga belum mendapatkan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan. Karena itu, bagi kategori anak yang hidup di jalan diperlukan ruang khusus bagi mereka terkait dengan pendidikan keagamaan, maka diperlukan pengajian khusus untuk mereka yang diselenggarakan di lingkungan tempat mereka mangkal.

### SUMBER BACAAN

- Antariksa, *Intelektual, Gagasan Subaltern, dan Perubahan Sosial*, <http://kunci.or.id/esai/misc/antariksa-subaltern.htm>
- Azis, Moh. Ali, dkk (ed.) (2005): *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Chaniago, A. Andrinof (2001): *Gagalnya Pembangunan Kajian Ekonomi Politik terhadap Krisis Indonesia*. Jakarta, LP3ES.
- Darmaningtyas (2005): *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta, LKiS & Pelangi Aksara.
- Meighan Roland (1981): *A Sociology of Educating*. London, Holt, Rinehard and Wiston Ltd.
- MPR RI (2006): *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.

- \_\_\_\_\_. *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Neuman, Lawrence W (1991): *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. USA, Allyn & Bacon.
- Rosyada, Dede (2005): "Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional" Makalah *Workshop Pengembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan*. Jakarta, Lembaga Penelitian UNJ-Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 27 Juli.
- Subhansyah, Aan T, dkk (2004) *Anak Jalanan di Indonesia: Deskripsi Persoalan dan Penanganan*. Yogyakarta, YLPS Humana.
- Twikoro, Y. Argo (1999): *Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya "Resmi*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Twikoro, Y. Argo (1999) *Pemulung Jalanan: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-Bayang Budaya Dominan*. Yogyakarta, Media Pressin.
- Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta